



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO:451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya YCAB dalam Mendukung Target Pembangunan**  
**Berkelanjutan (SDGs) melalui Kerja Sama**  
**dengan Pemerintah Indonesia (2016-2017)**

Skripsi

Oleh

Daniel Argo Triarmadi

2014330163

**BANDUNG**

**2018**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya YCAB dalam Mendukung Target Pembangunan**  
**Berkelanjutan (SDGs) melalui Kerja Sama**  
**dengan Pemerintah Indonesia (2016-2017)**

Skripsi

Oleh

Daniel Argo Triparmadi

2014330163

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe

**BANDUNG**

**2018**



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Daniel Argo Triparmadi  
Nomor Pokok : 2014330163  
Judul : Upaya YCAB dalam Mendukung Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia (2016-2017)

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 3 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Sylvia Yazid Ph.D

**Sekretaris**

Dr. Atom Ginting Munthe

**Anggota**

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi Ph.D

  
:  
  
:  


Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daniel Argo Triparmadi  
NPM : 2014330163  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya YCAB dalam Mendukung Target  
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Kerja  
Sama dengan Pemerintah Indonesia (2016-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juli 2018



Daniel Argo Triparmadi

## **KATA PENGANTAR**

Pendidikan di Indonesia masih bermasalah dan membutuhkan berbagai peningkatan. Beberapa permasalahannya adalah ketimpangan dalam angka melek huruf, rendahnya angka lanjut sekolah, dan ketidak-sesuaian pengajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, yang berujung pada permasalahan rendahnya keterserapan lulusan SMK ke lapangan pekerjaan dan kesulitan dalam berwirausaha. Di sisi lain, sudah ada sebuah komitmen internasional yaitu SDGs, yang berperan menjadi panduan bagi aktor-aktor internasional yang terlibat dalam menjawab berbagai permasalahan di dunia, termasuk pendidikan.

Hal ini menumbuhkan rasa ingin tahu penulis untuk meneliti bagaimana YCAB sebagai sebuah organisasi non-pemerintah internasional bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, menjalankan program dalam sektor pendidikan, dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian SDGs sektor pendidikan di Indonesia. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana aktor non-negara, khususnya organisasi non-pemerintah, dapat berkontribusi dalam menjawab suatu permasalahan yang ada di dunia.

Penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan atas skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa masukan sangat diperlukan agar dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih pada pihak-pihak yang mendukung pada masa kuliah dan penulisan skripsi ini:

Bapa yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi;

Keluarga penulis, terutama Ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan apa pun kondisinya;

Bapak Dr. Atom Ginting Munthe sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat membantu penulis dengan mengarahkan penulisan dan penelitian yang dilakukan;

YCAB yang telah sangat responsif membantu penulis dalam mencari data yang diperlukan untuk melakukan penelitian;

Yayasan, BKA Universitas Katolik Parahyangan, dan Ibu Ayu BKA yang telah sangat mendukung penulis selama belajar di UNPAR dari sisi finansial;

Mary Virginia Andrikus yang secara luar biasa mendampingi, mendukung, dan menginspirasi penulis selama 4 tahun masa kuliah hingga sekarang; dan

Teman-teman, dosen-dosen, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

Masa perkuliahan dan penulisan skripsi penulis adalah bukti nyata bahwa seseorang yang biasa, dengan berkat dan penyertaan Bapa, dan dikelilingi oleh orang-orang luar biasa, maka dapat melakukan apa pun yang dikehendakinya.

Demikian skripsi ini ditulis, sebagai pengabdian terakhir penulis sebagai seorang mahasiswa S1.

“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu.”

Bandung, 16 Juli 2018

Daniel Argo Triparmadi

## ABSTRAK

Nama : Daniel Argo Triparmadi

NPM : 2014330163

Judul : Upaya YCAB dalam Mendukung Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia (2016-2017)

---

Pendidikan merupakan salah satu hal paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat dan negara untuk berkembang. Sayangnya, kondisi pendidikan di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian untuk diperbaiki. Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2015 dibuat dan menjadi panduan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama membenahi berbagai sektor yang terbagi ke dalam ketujuh belas targetnya, salah satunya dalam sektor pendidikan. Dalam usaha memperbaiki kondisi pendidikan dan mencapai SDGs, negara-negara mendapatkan dukungan dari berbagai pihak non-negara, salah satunya adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menjalankan operasinya di Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana YCAB bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan yang terdapat dalam butir keempat SDGs. Teori peran dan fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer digunakan oleh penulis untuk menjawab perumusan masalah penelitian dan menyimpulkan bahwa YCAB berkontribusi dalam mendukung SDGs dengan menjalankan peran sebagai aktor dan menjalankan fungsi operasi, melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kelompok Belajar (Kejar) Paket, dan Kursus Kejuruan, yang mendukung upaya pencapaian SDGs sub-butir 4.1, 4.3, dan 4.4.

Kata kunci: YCAB, Pendidikan, Indonesia, SDGs

## **ABSTRACT**

*Name : Daniel Argo Triparmadi*

*NPM : 2014330163*

*Title : YCAB's Effort to Support Sustainable Development Goals (SDGs) by Cooperating with Indonesia's Government (2016-2017).*

---

*Education is essential for a community and a country to grow. Unfortunately, education in Indonesia is still in need for a lot of attention. Sustainable Development Goals (SDGs) was established in 2015 to become a guideline for countries, including Indonesia, to alleviate problems that are mentioned through its seventeen goals, including one that is related to education sector, which is mentioned in its fourth goal. In its effort in alleviating education problems and achieving SDGs, countries including Indonesia are always been supported by a wide-range of stakeholder, including Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), which is an international non-governmental organization who operates in Indonesia.*

*This research is explaining how YCAB, cooperating with Indonesia's Government, contributes in an effort to achieve SDGs in Indonesia, especially in the education sector. International Organization's Role and Function Theory by Clive Archer will be used to answer the research question and conclude that YCAB contributes in an effort to achieve SDGs by having a role as an actor and doing operation function, through its programs which are Community's Education Activity Center (PKBM) and Kejar Paket, and Vocational Courses, which supports the effort in achieving SDGs sub-target 4.1, 4.3, and 4.4*

*Keywords: YCAB, Education, Indonesia, SDGs*



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ucapan Terima Kasih.....	ii
Abstrak .....	iii
Abstract .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	10
1.2.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	11
1.4. Kajian Literatur .....	11
1.5. Kerangka Pemikiran .....	16
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
1.6.1. Metode Penelitian .....	23
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.7. Sistematika Pembahasan .....	24
1.8. Lini Masa Penulisan .....	25
<b>BAB II</b> <b>Yayasan Cinta Anak Bangsa sebagai Organisasi Non-Pemerintah Internasional di Indonesia</b>	
2.1.Latar Belakang Pembentukan YCAB .....	26
2.2.Visi, Misi, Strategi, dan Tujuan YCAB .....	28
2.3.Program dan Proyek YCAB .....	31
2.4.Struktur Organisasi dan Keanggotaan YCAB .....	36

	2.5. Prosedur dan Mekanisme Program HOLD YCAB .....	39
	2.6. Kemitraan YCAB .....	41
	2.7. Pendanaan YCAB .....	43
BAB III	SDGs dan Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap SDGs	
	3.1. Latar Belakang SDGs .....	45
	3.2. SDGs sebagai Komitmen Internasional.....	47
	3.3. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Mencapai Target-target dalam SDGs .....	53
BAB IV	Upaya YCAB dalam Mendukung SDGs melalui Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia	
	4.1. PKBM dan Kejar Paket.....	58
	4.2. Kursus Kejuruan .....	66
BAB V	Simpulan.....	77
	Daftar Pustaka .....	83
	Lampiran .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program HOLD YCAB, Tahun 2016-2017 .....	32
Tabel 3.2 Sub-butir dan Indikator Butir Ke-4 SDGs .....	49
Tabel 4.1 Program PKBM dan Kejar Paket Tahun 2017 .....	59
Tabel 4.2 Indikator Sub-butir 4.1 SDGs .....	63
Tabel 4.3 Indikator Sub-butir 4.3 SDGs .....	65
Tabel 4.4 Program Kursus Kejuruan Tahun 2017 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lini Masa Penulisan Makalah .....	25
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Keanggotaan YCAB .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem global terdiri atas interaksi yang terjadi di antara berbagai aktor global.<sup>1</sup> Interaksi yang dimaksud dalam sistem global memiliki sifat lintas batas negara, baik secara langsung (interaksi terjadi diantara aktor yang berada di negara berbeda), ataupun tidak langsung (pengaruh yang ditimbulkannya melewati batas negara). Selain interaksi lintas batas negara, sistem global juga terdiri atas aktor. Entitas yang dianggap sebagai aktor dalam sistem global diantaranya meliputi negara, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah internasional, pergerakan sosial, hingga kelompok-kelompok domestik dan individu-individu yang memiliki pengaruh secara lintas batas negara.<sup>2</sup>

Interaksi yang terjadi antar-aktor dalam suatu sistem disebabkan karena adanya motivasi dari masing-masing aktor yang bersinggungan antara satu dengan lainnya.<sup>3</sup> Dalam kondisi ini, mungkin terjadi suatu kesesuaian motivasi, ataupun justru perbedaan motivasi diantara aktor-aktor. Kesesuaian tujuan diantara aktor-aktor bisa menyebabkan terbentuknya kerja sama antar-aktor

---

<sup>1</sup> Jill Steans et al., *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (China: Pearson, 2010), 14.

<sup>2</sup> Andrew Heywood, *Global Politics* (China: Palgrave Macmillan, 2011), 5.

<sup>3</sup> Jonathan Turner, *A Theory of Social Interaction* (California: Stanford University Press, 1988), 24.

untuk mencapai tujuan yang sama, sedangkan perbedaan tujuan dapat berujung pada konflik yang terjadi antar-aktor.<sup>4</sup>

Keberagaman motivasi diantara aktor-aktor dalam sistem global menjadi salah satu penyebab beragamnya dan luasnya isu dalam sistem global. Isu keamanan yang tadinya mendominasi sebagai isu global, semakin lama kehilangan dominasinya dalam sistem global, karena isu-isu lain yang sebelumnya tidak dipertimbangkan mulai dianggap berperan besar dalam membentuk sistem global.<sup>5</sup> Isu pendidikan, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, bersama dengan isu-isu non-tradisional lainnya menjadi agenda yang tidak kalah penting dibanding isu tradisional seperti isu keamanan.<sup>6</sup> Dengan keberagaman isu yang berkembang dalam sistem global, membuat kemunculan berbagai aktor non-negara dapat membantu negara dalam menanggapi isu-isu global yang ada.

Salah satu isu yang telah menjadi isu global saat ini adalah isu pendidikan, yang merupakan fokus bahasan dari penelitian ini. Pendidikan menjadi penting karena memegang peranan yang strategis dalam pembangunan sebuah negara.<sup>7</sup> Melalui pendidikan yang baik, mampu dihasilkan manusia sebagai pelaku pembangunan yang mampu mengembangkan potensi-potensi di dalam diri dan mengambil peran dalam pembangunan dalam berbagai aspek di masyarakat. Pendidikan merupakan investasi bagi terbentuknya sumber daya

---

<sup>4</sup> Jonathan Turner, *A Theory of Social Interaction*, 20.

<sup>5</sup> Andrew Heywood, *op.cit.*, 1.

<sup>6</sup> Paul D'Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs* (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 4.

<sup>7</sup> Subdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2017*, (Jakarta: BPS, 2017), vii.

manusia berkualitas; dalam memperoleh pendidikan, seseorang secara tidak langsung melakukan investasi atas waktunya untuk menyiapkan diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya, agar kemudian mampu berkontribusi di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tindakan mengabaikan pendidikan bagi anak-anak bangsa merupakan salah satu tindakan yang menyebabkan sebuah negara semakin lama semakin menjadi lemah, karena perkembangan sebuah negara tidak akan dapat terjadi lebih cepat daripada perkembangan pendidikan nasionalnya.<sup>9</sup>

Pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia dan negara telah mendorong pengakuan secara universal atas pendidikan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini tertera pada artikel 26 dalam *Universal Declaration on Human Rights* pasalnya yang pertama, yang mengatakan bahwa semua orang memiliki hak atas pendidikan, dimana pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tahap fundamental dan dasar, selain itu pendidikan profesional dan teknis perlu dibuat tersedia secara luas, dan pendidikan tinggi perlu untuk dapat diakses secara merata oleh semua orang.<sup>10</sup> Artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan telah diakui secara universal sebagai suatu hal yang esensial bagi seorang manusia. Baik pendidikan dasar dan fundamental, ataupun teknis dan profesional, terbukti melalui artikel ini bahwa negara-negara anggota PBB mendukung terlaksananya pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang karena pendidikan adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia secara mendasar. Peran penting pendidikan bagi seseorang dan sebuah negara

---

<sup>8</sup> Subdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2017, vii.

<sup>9</sup> Daoed Joesoef, "Memikir Ulang Pendidikan," *Kompas*, 25 Januari 2017.

<sup>10</sup> UN General Assembly, "Universal declaration of human rights," *UN General Assembly*, 1948.

membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendidikan, khususnya dalam konteks hubungan internasional.

Tak hanya dalam konteks global, dalam konteks nasional pun Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pendidikan. Maka dari itu, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>11</sup> Pendidikan dasar maksudnya adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.<sup>12</sup> Hal ini didasari dengan kesadaran bahwa pendidikan memungkinkan seseorang untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup>

Negara-negara yang tergabung dalam PBB telah menyusun sebuah kerangka yang disebut dengan SDGs, yang memiliki target-target sesuai untuk menjadi kerangka bagi pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara, termasuk permasalahan dalam sektor pendidikan. SDGs telah menjadi suatu agenda universal bagi negara-negara anggota PBB dalam usaha untuk melanjutkan hal-hal yang sudah terbentuk dalam Tujuan Pembangunan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Pemerintah Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



Milenium (MDGs) pada tahun 2016.<sup>14</sup> SDGs memuat bidang-bidang yang di dominasi oleh isu sosial dan lingkungan. Isu-isu ini meliputi isu kelaparan, kemiskinan, kesehatan, perkembangan ekonomi, dan isu-isu sosial dan lingkungan lainnya.<sup>15</sup>

Keberagaman isu yang dalam dunia internasional diselingi dengan keberagaman aktor.<sup>16</sup> Dengan beragamnya permasalahan dan banyaknya aktor dengan tujuan yang berbeda-beda, dapat memungkinkan terbentuknya suatu kerja sama antar-aktor dalam sistem global sehingga mampu mewujudkan bersama tujuannya masing-masing.<sup>17</sup>

Indonesia sebagai salah satu aktor dalam sistem global pun tidak bertindak sendiri dalam memperhatikan dan menjawab isu-isu global yang ada, karena kemampuan aktor non-negara seperti organisasi internasional non-pemerintah, juga kelompok-kelompok domestik dalam suatu negara untuk berkontribusi telah semakin besar.<sup>18</sup> Banyak terdapat aktor non-negara seperti perusahaan multinasional hingga organisasi internasional yang mampu berperan untuk bekerja sama dengan aktor-aktor negara dalam menanggapi isu-isu global ini.<sup>19</sup> Salah satu aktor non-negara dalam sistem global yang memiliki pengaruh terhadap usaha menjawab isu-isu global adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB).

---

<sup>14</sup> United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," *sustainabledevelopment.un.org*, 21 Oktober 2015.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Richard Mansbach dan Kirsten Rafferty, *Introduction to Global Politics* (New York: Routledge, 2008), 21.

<sup>17</sup> Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence* (Illinois: Pearson, 2012), 21.

<sup>18</sup> Andrew Heywood, *op.cit.*, 5.

<sup>19</sup> Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *op.cit.*, 21.

Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana aktor-aktor non-negara, khususnya YCAB melalui program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam PKBM dan Kejar Paket, dan Kursus Kejuruan, dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung SDGs sektor pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, dapat dimengerti proses yang terjadi untuk kemudian dijadikan bahan pembelajaran, agar kedepannya dapat dilakukan maksimalisasi sehingga potensi-potensi yang muncul dari kerja sama aktor non-negara dengan negara dapat diarahkan dengan lebih efektif.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan berperan besar dalam perkembangan suatu negara. Namun, faktanya tidak semua orang dapat mengikuti pendidikan. Di Indonesia, pada tahun 2017, terdapat sebesar 6,9 persen penduduk umur 5 tahun sampai 24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah, sedangkan yang pernah bersekolah namun tidak bersekolah lagi sebesar 67,59 persen, dan penduduk yang masih bersekolah hanya sebesar 25,48 persen.<sup>20</sup>

Data angka partisipasi sekolah di Indonesia pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok umur sekolah di Indonesia, maka semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,14 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 95,08

---

<sup>20</sup> Subdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2017, (Jakarta: BPS, 2017), 31.

persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 71,42 persen, dan pada kelompok umur 19-24 tahun sebesar 24,77 persen.<sup>21</sup> Hal ini terjadi bersamaan dengan fakta bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar angka putus sekolahnya.<sup>22</sup>

Selain itu, kondisi tingginya angka putus sekolah di Indonesia diperparah dengan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam sektor pendidikan di Indonesia, diantaranya kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini terlihat dari APS daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan APS pedesaan, dan selisih APS perkotaan dan pedesaan ini mengalami peningkatan seiring bertambahnya umur.<sup>23</sup>

Ketimpangan juga terlihat dalam kemampuan membaca yang bisa diperhatikan dari Angka Melek Huruf (AMH), dimana AMH perkotaan lebih besar dari AMH pedesaan. Selain perkotaan dan pedesaan, kesenjangan dalam AMH di Indonesia juga terjadi diantara laki-laki dan perempuan, dimana AMH laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. AMH perempuan berumur 15 tahun keatas sebesar 93,76 persen, sedangkan laki-laki sebesar 97,25 persen.<sup>24</sup> Status ekonomi juga turut memetakan kemampuan penduduk 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis. Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis pada kelompok penduduk dengan status ekonomi bawah masih rendah dibandingkan dengan status ekonomi atas, dengan perbedaan hingga mencapai 8 persen lebih.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 32.

<sup>22</sup> *Ibid*, 68.

<sup>23</sup> *Ibid*, 33.

<sup>24</sup> *Ibid*, 62.

<sup>25</sup> *Ibid*, 63.

Apabila dilihat lebih detil pada pendidikan menengah, khususnya SMK, orientasi pendidikan SMK yang bertujuan untuk memberikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), belum terlaksana dengan baik, dikarenakan kemitraan SMK dan industri masih tergolong lemah. Tidak terbentuk hubungan kemitraan yang baik antara SMK dan industri, sehingga kompetensi lulusan SMK tidak relevan dengan kebutuhan industri, dan menyebabkan tidak terserapnya lulusan SMK ke dalam industri.<sup>26</sup> Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia pada tahun 2017.<sup>27</sup> Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena peningkatan angka pengangguran lulusan SMK tidak hanya terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017, melainkan sudah menjadi tren yang dimulai sejak tahun 2014.<sup>28</sup>

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam perkembangan manusia dan negara. Namun dengan segala permasalahan yang ada di Indonesia dalam sektor pendidikan, dimulai dari rendahnya AMH, hingga ketidak-tepatan pengajaran dalam SMK dengan kebutuhan industri, diiringi dengan berbagai permasalahan lainnya, membuat Indonesia perlu untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa mendorong perkembangan masyarakat dan negara.

---

<sup>26</sup> Yosep Efendi, "Potret Buram Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan," *Kompasiana*: 10 November 2016. Diakses 24 Januari 2018 [https://www.kompasiana.com/yosepefendi/potret-buram-penyelenggaraan-pendidikan-kejuruan\\_5824863487afbd0f35b8037f](https://www.kompasiana.com/yosepefendi/potret-buram-penyelenggaraan-pendidikan-kejuruan_5824863487afbd0f35b8037f)

<sup>27</sup> Gumanti Awaliyah, "Apindo: Kualitas Lulusan SMK Belum Penuhi Kebutuhan Industri," *Republika*: 7 November 2017. Diakses 26 Januari 2018 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/07/oz18yx382-apindo-kualitas-lulusan-smk-belum-penuhi-kebutuhan-industri>

<sup>28</sup> Kontributor Harian Kompas, "Jutaan Lulusan SMK Menganggur," *Kompas*, 17 Oktober 2016, 1.

Sudah dibentuk SDGs sebagai kerangka yang membantu Indonesia bersama dengan aktor-aktor non-negara lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia. Salah satu aktor non-negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah YCAB, organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menyediakan pusat kegiatan belajar-mengajar yang disebut Rumah Belajar. Pada Rumah Belajar tersebut, dijalankan program PKBM dan Kejar Paket yang ditawarkan adalah setingkat SD, SMP, dan SMA, sedangkan program Kursus Kejuruan terdiri dari kursus komputer, menjahit, membatik, elektronik, dan kecantikan.<sup>29</sup>

Program-program PKBM dan Kejar Paket, dan Kursus Kejuruan yang telah berjalan pada tahun 2016-2017 telah diinisiasikan sebelum tahun 2016. Dalam proses inisiasi program, YCAB berdasarkan penelitian terhadap lokasi-lokasi yang telah dilakukan dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Suku Dinas Pendidikan Republik Indonesia, telah memiliki prioritas lokasi pendirian Rumah Belajar, yang disertai dengan jenis kursus keterampilan yang dianggap oleh YCAB paling diperlukan di lokasi tersebut. Jenis Kursus Kejuruan yang ditawarkan adalah kursus komputer, kursus elektronik, kursus membatik, kursus kecantikan, dan kursus menjahit.<sup>30</sup>

Kerja sama antar-aktor yang terjadi dalam usaha mendukung ketercapaian SDGs perlu dipelajari, demi membentuk kerja sama yang lebih baik kedepannya. Bagaimana kerja sama diantara YCAB dengan Pemerintah Indonesia berjalan,

---

<sup>29</sup> YCAB Foundation, "Organization Profile," *YCAB Foundation*, 2017.

<sup>30</sup> Sulystianing Palupijati, *op.cit.*

hingga akhirnya memberikan kontribusi terhadap SDGs di Indonesia khususnya dalam sektor pendidikan dibahas secara mendalam di penelitian ini.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada upaya YCAB dalam mendukung upaya pencapaian SDGs sektor pendidikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Pembahasan masalah dilakukan dalam periode waktu tahun 2016-2017. Jangka waktu ini diambil karena pada tahun 2016 kerja sama diantara Pemerintah Indonesia dan YCAB sudah diarahkan untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia, dan diakhiri pada tahun 2017 karena didapatkan informasi dari Oky Setiady, sebagai penanggung jawab Program HOLD YCAB, bahwa pada tahun 2018 dilakukan perubahan dalam YCAB yang didasari mulai dari perubahan isu yang difokuskan oleh YCAB, struktur organisasi dan strategi, hingga operasionalisasi dalam penjalanan program-programnya, termasuk dalam penjalanan program kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam sektor pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat dari program-program yang ada dan menyesuaikan organisasi dengan perkembangan zaman.<sup>31</sup>

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji telah dirumuskan dalam sebuah pertanyaan dimana jawabannya adalah keluaran dari penelitian ini, yakni **“Bagaimana upaya YCAB melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia berkontribusi dalam**

---

<sup>31</sup> Oky Setiady (Program Management YCAB), diwawancarai oleh Daniel Argo Triparmadi di Rumah Belajar YCAB Duri Kepa, 2 Maret 2018.

**upaya pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sektor pendidikan di Indonesia pada periode tahun 2016-2017?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana kerja sama antara YCAB dengan Pemerintah Indonesia dalam periode tahun 2016-2017 berjalan dan berkontribusi dalam masyarakat khususnya dalam sektor pendidikan, sehingga berkontribusi dalam upaya pencapaian SDGs sektor pendidikan di Indonesia.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk memenuhi kegunaannya yaitu sebagai bahan pengetahuan penstudi umum dan/atau penstudi ilmu hubungan internasional untuk mengetahui bentuk kerja sama antara YCAB dengan Pemerintah Indonesia, dan kontribusinya bagi masyarakat dalam sektor pendidikan dan upaya pencapaian SDGs sektor pendidikan pada tahun 2016-2017.

### **1.4 Kajian Literatur**

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah literatur-literatur lain yang sudah ada dan terkait dengan subjek yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah “*Poverty, Social Exclusion and the MDGs: The Challenge of ‘Durable Inequalities’ in the Asian Context*” yang ditulis oleh Naila Kabeer, “*Civil Society and the MDGs*” yang ditulis oleh Roberto Bissio, dan

“*Complementarity of ODA and NGO Roles: A Case Study of Japanese Support of the Millennium Development Goals*” oleh Hyo-sook Kim dan David Potter.

Jurnal akademis berjudul “*Poverty, Social Exclusion and the MDGs: The Challenge of ‘Durable Inequalities’ in the Asian Context*” oleh Naila Kabeer mengulas bagaimana suatu kolaborasi berbagai aktor dapat mendukung kelompok-kelompok yang kemungkinan paling sedikit mampu mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dalam negara di Asia untuk mendapat manfaat dari program-program pembangunan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dalam upaya pencapaian MDGs.<sup>32</sup>

Naila Kabeer dalam jurnal akademis ini berpendapat bahwa meskipun adanya pertumbuhan ekonomi besar-besaran di kawasan Asia yang dinikmati oleh hampir seluruh negara-negara di Asia, sehingga bisa diiringi dengan semakin gencarnya program-program pembangunan terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, namun kemiskinan masih dapat melekat di beberapa kelompok masyarakat terutama kelompok masyarakat asli yang tertinggal, sehingga yang terbentuk justru ketidak-setaraan yang semakin besar.<sup>33</sup> Naila Kabeer juga berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan tidak mampu untuk menargetkan pada individu-individu yang membutuhkan secara langsung. Hal ini disebabkan karena negara tidak dapat secara aktif menemukan permasalahan kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi karena mereka tidak terlihat di pasar ekonomi negara.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Naila Kabeer, “Poverty, Social Exclusion and the MDGs: The Challenge of ‘Durable Inequalities’ in the Asian Context,” *IDS Bulletin* 37 (2006): 64.

<sup>33</sup> *Ibid*, 65.

<sup>34</sup> *Ibid*, 65.



Jurnal ilmiah ini memberikan solusi berupa kolaborasi oleh berbagai aktor; diantaranya perusahaan, organisasi non-pemerintah, pemerintah, ataupun donor. Sehingga dengan begitu, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari usaha pengembangan masyarakat yang tertinggal (diantaranya terbatasnya informasi dan kesadaran bahwa ada kelompok masyarakat yang tertinggal, dan mendistribusikan orang-orang profesional ke pedalaman dan daerah tertinggal) dapat terjawab.<sup>35</sup>

Jurnal ilmiah ini membantu penulis dalam membentuk kerangka pemikiran terkait sejauh mana suatu kelompok domestik dapat membantu negara dalam menyukseskan targetnya, dalam hal ini target yang merupakan realisasi dari komitmen internasional. Penelitian yang dilakukan penulis berkomplementer dengan penelitian ini karena di satu sisi sama-sama melihat kelompok yang mencoba meraih kelompok yang jauh (menengah kebawah), namun penelitian penulis mengisi kekosongan karena penelitian penulis melihat sudut pandang yang lebih memfokuskan pada kelompok yang berkooperasi dan mendukung pemerintah, dimana penelitian Naila Kabeer lebih memfokuskan pada sudut pandang pemerintah.

Jurnal ilmiah berjudul “*Civil Society and the MDGs*” yang dilakukan Roberto Bissio menekankan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam pembuatan Target Pembangunan Milenium (MDGs) tidak terjadi secara langsung dengan cara hadir dalam pertemuan, sehingga pada awalnya MDGs masih belum diketahui secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil domestik.<sup>36</sup> Hal ini

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 70.

<sup>36</sup> Roberto Bissio, “Civil Society and the MDGs,” *Development Policy Journal* 3 (2003): 151.

menyebabkan sulitnya ditumbuhkan rasa kepemilikan atas agenda-agenda yang tertera dalam MDGs dalam masyarakat sipil.<sup>37</sup> Di sisi lain, komitmen dalam MDGs untuk membangun kerja sama yang kuat dengan sektor privat dan organisasi masyarakat sipil, dan untuk memberikan kesempatan lebih besar untuk sektor privat, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, menjadi kurang jelas tergambar.<sup>38</sup>

Jurnal ilmiah ini berkontribusi terhadap penelitian penulis dengan memberikan pemahaman terhadap bentuk partisipasi aktor non-pemerintah terhadap upaya pencapaian komitmen internasional, dalam kasus ini MDGs. Dengan memberikan pemahaman tentang lima rintangan bagi keikut-sertaan masyarakat sipil dalam upaya pencapaian MDGs (skeptisme publik, publik merasa tidak diikuti-sertaan, bagaimana pendanaannya, permasalahan dalam perdagangan, dan bentuk hubungan yang terjadi antara negara pemberi bantuan dan penerima bantuan), penelitian ini juga membantu penulis dalam menemukan keterbatasan aktor non-negara dalam agenda-agenda yang dimiliki oleh negara. Penelitian ini digunakan sebagai dasar pemahaman terkait hal-hal yang mungkin membatasi aktor non-negara dalam berpartisipasi. Posisi penelitian yang dilakukan penulis mengisi kekosongan dalam penelitian oleh Roberto Bissio, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana kerja sama yang dilakukan antara aktor negara dengan non-negara dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian komitmen internasional SDGs.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 154.

<sup>38</sup> *Ibid*, 154.

Tulisan berjudul “*Complementarity of ODA and NGO Roles: A Case Study of Japanese Support of the Millennium Development Goals*” mendeskripsikan bagaimana NGOs berperan terhadap upaya pencapaian MDGs di Jepang, dengan cara menggunakan ODA (*Official Development Assistance*) atau bantuan pembangunan resmi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga pemberi bantuan dana untuk membuat program-program yang sejalan dan mendukung upaya pencapaian MDGs di Jepang.<sup>39</sup> Literatur ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam kerja sama antara lembaga pemberi bantuan dana dengan organisasi non-pemerintah dalam usaha mencapai MDGs.<sup>40</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah saran bagaimana organisasi non-pemerintah di Jepang dapat lebih efektif mendukung perkembangan Jepang.

Jurnal akademis ini juga berpendapat bahwa organisasi masyarakat yang berkembang di Jepang dapat memberikan program yang secara langsung relevan dengan pencapaian MDGs dan dapat bersifat komplementer dalam upaya pencapaian MDGs oleh pemerintah. Konklusinya, program yang dibantu oleh ODA memiliki tendensi untuk lebih selektif dalam memilih lokasi dan sektor terkait upaya pencapaian MDGs daripada pemerintah turun langsung.<sup>41</sup>

Literatur oleh Hyo-sook Kim dan David Potter ini membantu penulis dengan menjadi salah satu dasar kerangka pemikiran bagi penulis untuk memahami hubungan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam usaha bersama untuk

---

<sup>39</sup> Hyo-sook Kim dan David Potter, “Complementarity of ODA and NGO Roles: A Case Study of Japanese Support of the Millennium Development Goals,” *Journal of Inquiry and Research* 99 (2014): 88.

<sup>40</sup> *Ibid*, 94.

<sup>41</sup> *Ibid*, 99.

mencapai suatu target internasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan penulis mengisi kekosongan dengan melanjutkan penelitian ini ke tahap selanjutnya setelah MDGs, dan memiliki posisi yang lebih fokus kepada satu bidang yaitu pendidikan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam perkembangan dunia internasional, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor; muncul aktor-aktor non-negara yang juga memiliki pengaruh dalam sistem global. Dalam skala yang lebih kecil daripada negara, aktor seperti birokrasi, perusahaan domestik, partai politik, hingga kelompok kepentingan dan kelompok masyarakat lainnya dianggap sebagai aktor yang berpengaruh dalam sistem global. Sedangkan dalam skala yang lebih besar daripada negara, aktor seperti organisasi internasional ataupun perusahaan multinasional turut berperan dalam berjalannya sistem global.<sup>42</sup> Berbagai entitas non-negara ini menjadi aktor penting bukan hanya disebabkan oleh aktivitas mereka dalam mengejar kepentingan dalam konteks internasional, namun juga karena mereka memegang fungsi sebagai pihak yang dapat mempengaruhi aktivitas negara dan kebijakannya.<sup>43</sup> Pandangan yang berfokus terhadap eksistensi keberagaman aktor dalam sistem global ini sering disebut sebagai Pluralisme.<sup>44</sup>

Aktor-aktor yang beragam dalam hubungan internasional bekerja sama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pandangan ini memiliki dasar sebuah

---

<sup>42</sup> Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *loc.cit.*

<sup>43</sup> *Ibid*, 21.

<sup>44</sup> Paul D'Anieri, *op.cit*, 80.

paradigma, yaitu liberalisme, yang berpendapat bahwa kerja sama mungkin terjadi dan merupakan suatu hal utama dalam segala bentuk relasi manusia, termasuk dalam konteks hubungan internasional.<sup>45</sup> Sehingga, aktor dalam hubungan internasional dapat menggunakan kerja sama sebagai cara untuk menggapai perubahan positif dalam sistem internasional. Liberalisme juga mengakui bahwa kerja sama yang didasarkan pada kesesuaian kepentingan merupakan ciri khas utama dalam hubungan internasional.<sup>46</sup>

Menurut liberalisme, kerja sama cenderung berasal dari upaya mencapai kepentingan pribadi secara rasional. Kerja sama terjadi bukan karena aktor menempatkan kepentingan bersama dan melupakan kepentingan pribadinya, namun justru kerja sama terjadi karena aktor-aktor berusaha untuk memenuhi kepentingannya masing-masing.<sup>47</sup> Dengan menjalin kerja sama, seringkali menjadi cara terbaik atau bahkan cara satu-satunya untuk mencapai kepentingannya.<sup>48</sup> Lebih spesifiknya, Liberalisme Sosiologis memiliki sebuah pandangan terkait kerja sama, dimana interaksi negara dapat dilakukan dengan aktor non-negara seperti individu, kelompok, atau pun organisasi non-pemerintah.<sup>49</sup>

Steve Charnovitz mengartikan organisasi non-pemerintah sebagai sekelompok individu yang berasal dari masyarakat dan terorganisir untuk suatu tujuan yang melibatkan aspirasi manusia, dimana mereka dapat dibentuk untuk

---

<sup>45</sup> Jill Steans et al., *op.cit*, 31.

<sup>46</sup> *Ibid*, 32.

<sup>47</sup> *Ibid*, 79.

<sup>48</sup> *Ibid*, 79.

<sup>49</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 102.

suatu alasan tertentu seperti untuk memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>50</sup> Organisasi non-pemerintah, yang berasal dari masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat ini, dapat memainkan peran penting dalam hubungan internasional.<sup>51</sup>

Menurut Clive Archer, organisasi non-pemerintah internasional, sebagai bagian dari organisasi internasional, dapat memberikan pengaruh dalam hubungan internasional, dengan memiliki peran dan fungsi.<sup>52</sup> Peran maksudnya bagaimana organisasi internasional berkontribusi dalam sistem internasional, sebagai tempat terjadi hubungan antara manusia, kelompok, bisnis, negara, dan aktor-aktor lainnya.<sup>53</sup> Fungsi maksudnya bagaimana organisasi internasional berkontribusi dan mempengaruhi proses yang terjadi dalam sistem internasional.<sup>54</sup>

Peran yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Instrumen maksudnya organisasi internasional berperan dengan dijadikan alat oleh anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.<sup>55</sup> Dalam konteks organisasi non-pemerintah internasional, ketika menjadi instrumen, maka posisinya akan merefleksikan posisi korporat, partai politik, kelompok gereja, ataupun aktor lainnya yang merupakan anggota dari organisasi non-pemerintah internasional tersebut. Dalam perannya sebagai instrumen, organisasi internasional diperebutkan

---

<sup>50</sup> Steve Charnovitz, "Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance." *Michigan Journal of International Law* 18 (1997): 186.

<sup>51</sup> UNDP, "Working With Civil Society in Foreign Aid," Diakses 20 Januari 2018, <http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH03%20Annexes.pdf>.

<sup>52</sup> Clive Archer, *International Organizations* (New York: Routledge, 2001), 65.

<sup>53</sup> *Ibid*, 65.

<sup>54</sup> *Ibid*, 65.

<sup>55</sup> *Ibid*, 68.

oleh anggotanya agar dapat digunakan demi kepentingan aktor, sehingga kemungkinan organisasi internasional tersebut untuk menjadi independen menjadi terbatas.<sup>56</sup>

Arena maksudnya adalah organisasi internasional menjadi suatu wadah atau forum dimana terjadi hubungan diantara anggotanya. Dengan berperan sebagai arena, organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggotanya untuk menjalin hubungan seperti bertemu dan berdiskusi, berdebat, ataupun bernegosiasi.<sup>57</sup> Organisasi internasional dapat dijadikan tempat terbuka bagi anggotanya untuk mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat dan masukannya agar diadopsi secara umum.<sup>58</sup>

Organisasi internasional juga dapat berperan menjadi aktor yang independen. Independen maksudnya memiliki kemampuan untuk mengambil suatu kebijakan tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh kekuatan dari eksternalnya.<sup>59</sup> Organisasi internasional yang independen memiliki respon dan kebijakan yang tidak diatur oleh aktor luar. Organisasi internasional yang berperan sebagai aktor memiliki kerangka institusional yang memampukan mereka untuk mencapai sesuatu yang lebih dari jika anggota-anggotanya tidak bekerjasama.<sup>60</sup> Organisasi non-pemerintah internasional dapat menjadi aktor dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam suatu ranah tertentu, seperti *relief assistance* dalam perang dan daerah yang terkena

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 69.

<sup>57</sup> *Ibid*, 73.

<sup>58</sup> *Ibid*, 74.

<sup>59</sup> *Ibid*, 79.

<sup>60</sup> *Ibid*, 80.

bencana, memberikan perhatian dan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan dimana pemerintah negara tidak mampu perhatikan, atau bahkan mediasi dalam permasalahan internasional.<sup>61</sup>

Selain peran, organisasi internasional juga memiliki fungsi dalam sistem internasional. Fungsi ini dibagi ke dalam sembilan klasifikasi, yaitu artikulasi dan penyatuan, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan peraturan, pengaplikasian peraturan, memutuskan peraturan, informasi, dan operasi.

Meski terjadi pengalokasian nilai dan sumber daya yang terjadi melalui persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sistem internasional tidak memiliki suatu badan khusus yang mengatur pengalokasian nilai dan sumber daya.<sup>62</sup> Dengan fungsi artikulasi dan penyatuan, organisasi internasional dapat menjadi instrumen anggotanya untuk mengungkapkan dan menyatukan kepentingan, memampukan para anggota untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat ke dunia internasional.<sup>63</sup> Selain itu, dalam menjalankan fungsi artikulasi dan penyatuan, organisasi internasional juga dapat menjadi forum dimana kepentingan-kepentingan yang berbeda diartikulasikan dan disatukan.<sup>64</sup> Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor yang mengartikulasikan dan menyatukan kepentingan anggota-anggotanya, dimana organisasi internasional menempatkan dan menyuarakan pendapat dan kepentingannya dalam sistem internasional.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 80.

<sup>62</sup> *Ibid*, 94.

<sup>63</sup> *Ibid*, 95.

<sup>64</sup> *Ibid*, 95.

<sup>65</sup> *Ibid*, 95.



Selain itu, norma maksudnya organisasi internasional mampu memainkan fungsi penting dengan membantu menciptakan norma dalam hubungan internasional. Salah satu bentuknya adalah dengan menyebarkan nilai yang sudah diadopsi di beberapa bagian dunia ke seluruh dunia. Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi, organisasi internasional telah membantu menciptakan norma tingkah laku, seperti hak penuh yang dimiliki negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisasi atas sumber daya yang ada dalam wilayahnya.<sup>66</sup>

Sedangkan fungsi rekrutmen maksudnya organisasi internasional dapat memainkan fungsi penting dalam melakukan rekrutmen terhadap aktor dalam sistem politik internasional. Secara spesifik, dalam konteks organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah internasional juga mampu memainkan fungsi rekrutmen aktor-aktor baru ke dalam sistem politik internasional. Organisasi non-pemerintah internasional mengumpulkan kelompok-kelompok dan individu-individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui suatu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah internasional tersebut.<sup>67</sup>

Organisasi internasional juga dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang ditujukan untuk mempererat hubungan individu dalam sebuah sistem, agar diterima karena kesesuaiannya dengan nilai yang dianut oleh sistem. Organisasi non-pemerintah internasional dapat melakukan proses sosialisasi dengan memengaruhi sistem kepercayaan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan juga dapat

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 95.

<sup>67</sup> *Ibid*, 98.

memengaruhi suatu negara untuk bertindak sesuai dengan nilai yang disosialisasikan, dimana nilai tersebut biasanya telah diadopsi secara internasional atau secara umum. Selain menjadi aktor dalam sosialisasi ke eksternal, organisasi internasional juga dapat melakukan sosialisasi terhadap anggotanya sendiri.<sup>68</sup>

Dalam konteks internasional, sumber dari peraturan beragam, dikarenakan tidak ada pemerintahan dunia. Sehingga peraturan bisa saja berasal dari penerimaan atas tindakan yang pernah dilakukan, persetujuan bilateral diantara negara, atau diadopsi dari organisasi internasional. Hal ini menyebabkan organisasi internasional memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pembuatan peraturan.<sup>69</sup>

Dalam kasus tertentu, organisasi internasional melakukan pengaplikasian atau penerapan peraturan yang diterima secara umum. Dalam konteks organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah internasional telah berpartisipasi dalam memonitor penerapan peraturan internasional oleh pemerintahan suatu negara. Dapat juga melakukan pengawasan atas pengaplikasian peraturan, dengan memberikan tekanan moral dengan publikasi.<sup>70</sup>

Memutuskan peraturan maksudnya organisasi internasional dapat memiliki fungsi untuk memberi keputusan atas klaim-klaim yang bertentangan yang diajukan oleh negara-negara dalam sistem internasional.<sup>71</sup>

Organisasi internasional telah menyediakan forum atau wadah bagi pemerintah dimana dapat memberikan dan menerima informasi. Dalam konteks

---

<sup>68</sup> *Ibid*, 100.

<sup>69</sup> *Ibid*, 103.

<sup>70</sup> *Ibid*, 105.

<sup>71</sup> *Ibid*, 106.

organisasi non-pemerintah internasional, beberapa diantaranya dapat memberikan publik informasi yang dicari. Organisasi dapat memberikan dua peran forum dimana anggota dapat bertemu dan bertukar ide dan aktor, dan dapat menyebarkan informasi tersebut ke pihak eksternal.<sup>72</sup>

Organisasi internasional juga dapat memegang fungsi dalam operasi. Fungsi operasi maksudnya adalah dengan menjalankan aktivitas operasional sebagai bagian dari sistem internasional, yang dapat terjadi dalam bentuk yang beragam, mulai dari perbankan, memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan, dan menjalankan dukungan teknis dalam suatu aktivitas. Organisasi non-pemerintah internasional juga mampu menjalankan fungsi operasi, khususnya dalam pemberian bantuan pada masyarakat yang membutuhkan.<sup>73</sup>

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif mengacu kepada proses pemahaman masalah sosial dan politik dengan laporan rinci sesuai dengan sudut pandang informan di seting ilmiah, dimana penekanan dilakukan pada pemahaman makna perilaku dan konteks sosial, politik, dan budaya sebagai tempat dimana interaksi berlangsung.<sup>74</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang mencakup upaya menganalisis data secara induktif, dalam artian proses yang dilakukan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, 107.

<sup>73</sup> *Ibid*, 108.

<sup>74</sup> FISIP UNPAR, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP* (Bandung: FISIP UNPAR, 2015), 18.

dibangun dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dilakukan interpretasi atas makna yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan ke cakupan yang lebih umum.<sup>75</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari YCAB, yaitu Oky Setiady (Program Management YCAB), Ellen Juniastin (Volunteer Specialist YCAB), dan Sulistyaning Palupijati (Senior Market and Business Intelligence YCAB). Wawancara dilakukan di kantor pusat YCAB dan salah satu Rumah Belajar YCAB yang terletak di Duri Kepa. Selain melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen yang bersumber dari laporan resmi, jurnal ilmiah, situs-situs internet, maupun buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Dalam laporan penelitian ini, pembahasan terbagi dalam 5 (lima) bab dengan spesifikasi: bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, deskripsi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penulisan dan teknik

---

<sup>75</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), 12.

pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Lalu, bab II membahas mengenai YCAB sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang beroperasi di Indonesia. Kemudian, bab III membahas mengenai SDGs dan tujuan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Setelah itu, bab IV yang membahas mengenai kerja sama yang terbentuk diantara Pemerintah Indonesia dan YCAB, dimana diuraikan bagaimana hubungan tersebut berjalan dan berkontribusi terhadap sektor pendidikan masyarakat, sehingga berkontribusi dalam upaya pencapaian SDGs sektor pendidikan di Indonesia, dengan pisau analisis berupa teori dan konsep. Terakhir adalah bab V yang berisikan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

## 1.8 Lini Masa Penulisan

Gambar 1.1 Lini Masa Penulisan Makalah

Proses Pengerjaan	2017	2018					
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Revisi Bab I							
Pengerjaan Bab II							
Pengerjaan Bab III							
Pengerjaan Bab IV							
Pengerjaan Bab V							
Penyempurnaan							